

Tantangan Strategis Indonesia ditengah Rivalitas Tiongkok versus AUKUS: Sebuah Analisis Dilema Tahanan

Yoggi Walesasi¹, Yoga Suharman², Andi Mappiare³

Universitas Amikom Yogyakarta^{1,2}, Universitas Muhammadiyah Makassar³

Abstrak

Aliansi pertahanan trilateral yang melibatkan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS) (AUKUS) dalam pengadaan kapal selam bertenaga nuklir memicu reaksi dari negara-negara di sekitar kawasan, termasuk Indonesia sebagai negara paling strategis di Indo-Pasifik. Sebagai salah satu kekuatan poros di Indo-Pasifik, Indonesia sendiri berada di posisi dilema diantara dua poros kekuatan besar, AUKUS dan Tiongkok yang saling berkontestasi pengaruh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tantangan kebijakan luar negeri Indonesia atas rivalitas geopolitik yang menempatkan Tiongkok berhadapan dengan AUKUS. Guna menjawab pertanyaan itu, tulisan ini meminjam pendekatan dilema tahanan sebagai alat analisis untuk mengurai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menentukan preferensi politik luar negerinya atas pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS. Tulisan ilmiah ini disajikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang diolah dari studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di posisi yang dilematis dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dan terperangkap ke dalam potensi pembelotan dan tekanan dari pihak-pihak yang sedang bersaing.

Kata kunci: AUKUS; Indonesia; rivalitas; dilema tahanan; aliansi.

The trilateral defense alliance involving Australia, Britain, and the United States (US) (AUKUS) in the procurement of nuclear-powered submarines triggered reactions from countries around the region, including Indonesia as the most strategic country in Indo-Pacific. As one of the axis powers in the Indo-Pacific, Indonesia itself is in a dilemma position between the two major power axes, AUKUS and China, which are contesting each other's influence. This paper aims to examine how Indonesia's foreign policy challenges the geopolitical rivalry that puts China versus AUKUS. In order to answer that question, this paper uses the prisoner's dilemma approach as a tool to unravel the problems faced by Indonesia in determining its foreign policy preferences. This paper is described using descriptive analysis techniques processed from literature studies. The results show that Indonesia is in a dilemmatic position in defending its national interests and is trapped in potential defections and pressure from competing parties.

Keywords: AUKUS; Indonesia; rivalry; prisoner's dilemma; defence alliance.



Pendahuluan

Pada September 2021, pemerintah Australia akhirnya memperoleh penghargaan dari Amerika Serikat (AS) setelah merayakan 70 tahun sejarah hubungan diplomatik kedua negara. Pada saat yang sama, keduanya juga menyepakati pembentukan pakta pertahanan trilateral bersama dengan Inggris pada 15 September 2021 yang kemudian diberi nama AUKUS (Brooke-Holland et al. 2021). Oleh ketiga negara tersebut, kerjasama itu merupakan sarana untuk mempromosikan integrasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan distribusi sektor pertahanan, khususnya dalam pengembangan proyek kapal selam bertenaga nuklir. Pembentukan aliansi pertahanan trilateral tersebut juga menggambarkan politik-keamanan internasional yang dinamis di kawasan Asia/Indo Pasifik. Secara historis, aliansi ini juga merupakan pakta keamanan baru sejak tiga dekade terakhir (Cheng 2022). Meskipun demikian, terdapat pandangan lain bahwa AUKUS merupakan bentuk minilateralisme yang merefleksikan persaingan strategis kebijakan luar negeri negara-negara dominan (*dominant powers*) untuk memperoleh keunggulan di kawasan Asia/Indo Pasifik (Swanstrom dan Panda 2021). Pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS dalam upaya pengembangan kapal selam bertenaga nuklir setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, adaptasi terhadap perkembangan teknologi persenjataan kontemporer yang semakin canggih. Kedua, persaingan dalam memperebutkan supremasi militer sekaligus respon terhadap kebangkitan China di kawasan Indo-Pasifik (Australian Department of Defence 2020; Julienne 2021).

Konsekuensinya, kesepakatan di dalam AUKUS melahirkan reaksi beragam bagi negara-negara sekitar dan mempengaruhi dinamika keamanan kawasan. ASEAN misalnya terbagi ke dalam kelompok pendukung (Filipina, Singapura, dan Vietnam) dan kelompok penentang (Malaysia dan Indonesia) (Jaknanihan 2021). Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup berperan di ASEAN menyatakan kekhawatiran terhadap pembentukan aliansi pertahanan AUKUS tersebut. Pemerintah Indonesia secara diplomatik menyatakan bahwa kesepakatan itu berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara besar (*great powers*) dan mempertajam proyeksi kekuatan militer di kawasan (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2021; Nugroho 2021). Senada dengan Indonesia, pemerintah Tiongkok juga bereaksi dengan menyatakan bahwa pembentukan AUKUS berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan Asia/Indo Pasifik.

Dalam konteks persaingan tersebut, Indonesia yang berkedudukan sebagai negara maritim paling strategis sedang menghadapi resiko yang problematis. Kekhawatiran Indonesia adalah wajar mengingat bahwa

negara anggota ASEAN ini berada di zona konsentris persaingan geopolitik AUKUS dan Tiongkok. Pada sisi lainnya, Indonesia juga dihadapkan pada kalkulasi untuk memelihara hubungan diplomatik secara bilateral yang telah terjalin dengan Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan China serta berupaya mempertahankan upaya non-proliferasi nuklir di kawasan (Priyandita dan Herscovitch 2021). Namun, sejauh ini, sikap Indonesia cenderung berada di 'dua kaki' dan berusaha untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini diterapkan. Atas dasar itu, tulisan ini mengajukan pertanyaan, bagaimana preferensi kebijakan keamanan Indonesia ditengah rivalitas AUKUS *versus* Tiongkok dan perpecahan di tubuh ASEAN, sementara pada sisi lainnya, Indonesia juga perlu mempertahankan hubungan secara bilateral dengan Tiongkok maupun anggota AUKUS ditinjau dari pendekatan dilema tahanan?

Riset-riset tentang AUKUS telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Beberapa yang ditemukan penulis, antara lain; pertama, penelitian Mariana Delanova (2021) yang menyoroti soal dampak AUKUS terhadap kondisi keamanan Indo-Pasifik. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa keberadaan AUKUS diperlukan untuk distribusi kekuatan relatif (*relative gain*) di kawasan Asia/Indo-Pasifik (Delanova 2021). Kedua, penelitian yang ditulis oleh Martin dan Krapta (2021) mempersoalkan tentang peluang Eropa untuk memainkan peran strategis di Indo-Pasifik. Penelitian itu menyatakan bahwa perjanjian AUKUS telah membentuk kembali potensi kerjasama E3 di Indo-Pasifik antara Jerman, Perancis dan Inggris (Martin dan Krapta 2021). Ketiga, riset yang dilakukan oleh Julienne (2021) menyatakan bahwa pembentukan aliansi AUKUS memiliki efek terhadap keseimbangan strategis bagi kawasan Indo-Pasifik meskipun tidak secara signifikan dalam waktu dekat, namun pada sisi lain akan membuat Tiongkok melakukan penyesuaian skenario yang tidak menguntungkan di masa depan (Julienne 2021).

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan riset yang dihasilkan dari studi kepustakaan (*library research*) yang dikaji secara kualitatif dan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dan fakta dalam riset ini dilakukan dengan metode berbasis internet (*internet based method*). Sementara, telaah terhadap literatur teoritis diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang meliputi jurnal ilmiah maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi dari negara-negara yang dijadikan obyek penelitian. Data, fakta dan informasi yang ditemukan diolah dan kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan tentang preferensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon kehadiran AUKUS dan kebangkitan Tiongkok di kawasan Asia/Indo Pasifik.

Landasan Teoritis

Dilema Tahanan

Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini ditelaah dari pendekatan dilema tahanan. Dilema tahanan adalah paradigma dari banyak situasi sosial maupun politik di mana ada penghargaan untuk kerja sama dan sanksi atau tekanan untuk tindakan non-kooperatif (Snyder 1971). Dilema tahanan dalam politik internasional digambarkan bahwa setiap negara dapat saja memilih kerjasama dan menghindari tindakan ofensif dan memilih untuk membelot (Center for European Studies 2022). Tindakan negara dalam politik internasional umumnya dipengaruhi oleh kepercayaan (*trust*) dan ketidakpercayaan (*distrust*). Pembelotan timbal balik dalam dilemma tahanan seringkali sulit dihindari dan itu menjadi strategi mencapai keseimbangan dalam kontestasi politik internasional (Kydd 2005). Dilema tahanan dalam tulisan ini digunakan untuk menelaah interaksi strategis dalam anarki sistem internasional yang memberikan pilihan problematis bagi pengambilan keputusan luar negeri untuk terlibat maupun tidak dalam perlombaan senjata dan memperumit kemampuan suatu negara untuk secara efektif mengakhiri perlombaan senjata.

Snyder mengilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa semua negara akan lebih baik jika tidak ada yang dipersenjatai dalam jangka panjang. Namun, jika satu dari semua negara itu berpikir negara lain tidak akan mempersenjatai diri, negara itu berpeluang tergoda untuk mempersenjatai diri demi keuntungan dengan paksaan atau perang melawan negara yang senjatanya dilucuti. Dengan kata lain, satu negara, khawatir bahwa negara lain akan bernalar dengan cara demikian, menawarkan untuk mempersenjatai dan melindungi diri dari kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Perumpamaannya, jika keduanya mulai mempersenjatai satu sama lain dan berusaha untuk merundingkan perlucutan senjata atau pengurangan senjata, mereka merasa tidak mungkin melakukannya karena masing-masing takut bahwa, jika dilucuti, yang lain dapat membelot dari kesepakatan. Hal ini mengafirmasi bahwa setiap negara terperangkap dalam perangkap ganda dilema tahanan (Snyder 1971).

Persaingan dalam pembentukan aliansi pertahanan juga dapat digambarkan dengan pendekatan dilema tahanan. Negara-negara tertentu yang tidak dapat mencapai kerjasama 1, 1, akan berusaha untuk melindungi diri dengan membangun 'poros kekuatan alternatif'. Hal ini tentu saja menimbulkan biaya dalam bentuk komitmen dan risiko politik baru, dan mengurangi fleksibilitas kebijakan. Lemahnya otoritas pusat yang mampu mengatur konflik antarnegara sebagaimana konsep anarki dalam politik internasional menempatkan negara secara terus-menerus berada dalam posisi terancam oleh negara lain. Hubungan antarnegara dalam politik

internasional dikarakterisasi dengan perjuangan terus-menerus untuk memperoleh keselamatan negara sendiri (*state survival*) di bawah bayang-bayang konflik dan perang (Snyder 1971). Dilema tahanan memberikan contoh mengapa negara 'secara rasional' cenderung mengejar strategi non-kooperatif ketimbang bekerjasama dengan suatu aliansi tertentu, atau sebaliknya. Alasannya cukup sederhana, yaitu meminimalisir kerugian semaksimal mungkin (Davies et al. 2015). Dilema tahanan dalam konteks interaksi strategis antara AUKUS, China dan Indonesia merefleksikan masalah kerjasama yang dihadapi negara dominan, termasuk Indonesia untuk memilih preferensi kooperatif atau non-kooperatif dibawah sistem internasional yang anarki.

Hasil dan Diskusi

Posisi Geostrategis Indonesia

Indonesia merupakan negara strategis yang berada di kawasan Asia/Indo Pasifik. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki luas laut yang paling besar. Wilayah laut Indonesia juga dimanfaatkan sebagai sarana pelayaran terbesar di dunia. Wilayah itu meliputi Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Makassar. Disamping itu, Indonesia juga dikelilingi oleh samudra Hindia di sebelah Barat, Laut Cina Selatan di bagian Utara dan Samudra Pasifik di sebelah Timur. Secara geoekonomi dan geopolitik, Indonesia merupakan corong utama sektor transportasi logistik hingga pertahanan-keamanan di kawasan di Asia/Indo Pasifik. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang cukup diminati dalam hal penyediaan jalur transportasi perdagangan dunia dan pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi negara-negara besar disekitar serta bagi luar kawasan. Fakta geografis itu mengafirmasi kedudukan Indonesia sebagai wilayah persilangan maritim dan posisi yang sangat strategis di kawasan Asia/Indo Pasifik (Scott 2019). Atas dasar itu, penulis menilai bahwa pembentukan pakta pertahanan AUKUS tidak dapat dipisahkan dari persaingan memperebutkan supremasi geoekonomi dan geopolitik hingga persaingan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan utama (*major powers*) di kawasan. Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis, menempatkan negara ini ke dalam pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang problematis dalam konteks kesepakatan AUKUS dan perluasan kekuatan serta pengaruh Tiongkok di kawasan Asia/Indo Pasifik.

Indonesia di tengah Rivalitas AUKUS - China: Pendekatan Dilema Tahanan

Mencermati dinamika keamanan kawasan Asia/Indo Pasifik dan posisi

Indonesia yang strategis secara geoekonomi dan geopolitik, menempatkan negara ini ke dalam pilihan-pilihan yang dilematis dari agresivitas Tiongkok dan AUKUS. Hal ini mengingat bahwa AUKUS sejatinya tidak lepas dari persaingan memperoleh supremasi kekuatan dan memperluas jangkauan *sphere of influence* di kawasan. Lahirnya AUKUS dan pengaruh Tiongkok di kawasan mengafirmasi kenyataan bahwa rivalitas kekuatan-kekuatan besar di Asia/Indo Pasifik (*the great power rivalry*) adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik internasional. Indonesia sebagai negara strategis dihadapkan pada kebijakan kooperatif atau non-kooperatif, baik terhadap AUKUS maupun Tiongkok ditengah-tengah hubungan bilateral yang berlangsung relatif baik kepada negara-negara yang terlibat di dalam pakta pertahanan tersebut. Pada sisi lainnya, Indonesia juga dihadapkan pada pertanyaan kritis tentang bagaimana mengelola hubungan bilateral dengan Tiongkok ditengah menguatnya pengaruh Tentara Pembebasan Rakyat yang dengan cepat menyamai kemampuan militer AS di berbagai arena – mulai dari pembuatan kapal hingga sistem pertahanan.

Meskipun Politik Luar Negeri Indonesia bercorak bebas aktif, namun dalam dilema tahanan, perluasan pengaruh Tiongkok dan kehadiran AUKUS menempatkan negara ini ke dalam perangkap dua kekuatan besar (*major power*) – meminjam istilah Graham T. Allison – berada dalam “Thucydides traps”. Indonesia berada “di persimpangan” untuk menentukan pilihan rasional kepada setiap pihak dengan konsekuensi yang kompleks atas setiap kebijakan luar negeri yang akan ditempuh. Kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia setidaknya dapat diklasifikasikan pada tiga hal sekaligus, yakni (1) mengupayakan sentralitas ASEAN; (2) mempertahankan kesepakatan zona bebas nuklir di kawasan Indo Pasifik; dan (3) memelihara hubungan bilateral yang telah terjalin dalam banyak sektor dengan negara-negara yang sedang bersaing.

Berada di tengah tekanan diplomatik Jakarta, Australia melalui Menteri Luar Negeri Marise Payne melakukan perjalanan ke Asia Tenggara untuk meyakinkan stabilitas kawasan Asia/Indo Pasifik. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian kekhawatiran Indonesia yang semakin meningkat tentang dampak pengembangan kapal selam tenaga nuklir Australia terhadap non-proliferasi di kawasan. Tensi diplomatik kedua negara terlihat tidak stabil. Namun, terlepas dari upaya Menteri Luar Negeri Australia untuk meredakan ketakutan di Jakarta dan ibu kota regional ASEAN lainnya, AUKUS melahirkan perbedaan persepsi ancaman bagi Australia dan Indonesia, terutama yang terkait proyeksi kekuatan di Asia/Indo-Pasifik (Priyandita dan Herscovitch 2021). Tanggapan awal Indonesia terhadap pembentukan AUKUS sangat penting mengingat

akan meminta peninjauan kembali perjanjian non-proliferasi dalam upaya untuk mencegah pengembangan kapal selam bertenaga nuklir. Pernyataan diplomatik Indonesia tersebut juga diikuti reaksi dari penasihat senior kementerian Luar Negeri China Wang Yi yang menyatakan kekhawatiran serius terhadap AUKUS (Tempo 2021). Canberra percaya bahwa “keseimbangan kekuatan yang mendukung kebebasan” hanya dapat dipertahankan dengan cara memperkuat kembali peran AS di kawasan melalui aliansi pertahanan AUKUS. Sebaliknya, para pejabat pertahanan di Jakarta berhati-hati dengan niat Washington seperti halnya juga dengan tindakan yang akan ditempuh oleh Beijing.

Strategi Indonesia untuk mengelola hubungan dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan China, adalah dengan memilih pendekatan kerja sama multilateral yang berpusat di ASEAN ketimbang bersikap kooperatif kepada AUKUS maupun Tiongkok secara terbuka. Namun terdapat tantangan lain, terutama ketika Indonesia mengupayakan soliditas anggota ASEAN. Filipina, Singapura, dan Vietnam justru mendukung kehadiran AUKUS untuk menyeimbangkan kembali kekuatan di kawasan (*balance of power*) dan menekan agresivitas Tiongkok (Choong dan Storey 2021). Filipina melalui menteri Luar negerinya, Teodoro Locsin, menyatakan bahwa penguatan militer Australia sangat penting untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok (Delanova 2021). Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Singapura bahwa AUKUS dinilai dapat mempromosikan stabilitas keamanan Asia Pasifik dan menegakkan kembali UNCLOS 1982 (Choong dan Storey 2021; Mohan 2021). Sementara, negara anggota ASEAN lainnya seperti Brunei Darusalam, Laos, Kambodja, Myanmar, Vietnam dan Thailand belum menunjukkan sikap eksplisit terhadap AUKUS. Terurainya sikap ASEAN mempengaruhi lahirnya poros-poros baru keamanan yang memecah sentralitas ASEAN sekaligus melahirkan preferensi kebijakan luar negeri yang kompleks bagi Indonesia.

Sejauh ini, strategi Indonesia belum terbukti sepenuhnya efektif untuk mencegah Tiongkok yang selama ini cukup agresif untuk memperoleh dominasi jangka panjang atas wilayah Laut Cina Selatan (Tiezzi 2014), begitu pula untuk merespon AUKUS. Klaim tumpang tindih sembilan garis putus-putus yang dilakukan Tiongkok dan perairan yang diklaim oleh Indonesia di Laut Natuna Utara masih mewarnai dinamika hubungan timbal balik kedua negara yang cenderung non-kooperatif. Adapun gambaran dilema tahanan dalam konteks Indonesia dan Tiongkok ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Indonesia – Tiongkok

	Positif		
Non-kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dukungan keamanan dan kerjasama pertahanan dari AUKUS. • Kehilangan mitra ekonomi strategis akibat ketidakpercayaan Tiongkok terhadap Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dukungan ekonomi-perdagangan dari Tiongkok atas dasar kerjasama. • Tiongkok tetap memperluas mempertahankan Laut China/Laut Natuna Utara. 	Kooperatif
	Negatif		

Permainan dilema tahanan dalam konteks interaksi strategis Indonesia – Tiongkok menunjukkan bahwa keduanya cenderung kooperatif untuk menolak pakta pertahanan AUKUS atas nama perdamaian dan non-proliferasi nuklir di kawasan. Namun, pada saat AUKUS diumumkan, kapal-kapal China masih tetap saja melanjutkan survei oseanografi di perairan yang diklaim Indonesia sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna Utara. Ini mengindikasikan bahwa Tiongkok sejatinya lebih diuntungkan dari sikap Indonesia menentang AUKUS. Argumennya adalah Indonesia cenderung non-kooperatif terhadap AUKUS, namun pada sisi lain Tiongkok melakukan “pembelotan” ketika berhadapan dengan Indonesia di Laut Natuna Utara. Sementara dalam konteks interaksi strategis Indonesia dengan AUKUS digambarkan dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 2. Indonesia dan AUKUS

	Positif		
Non-kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat non-proliferation treaty melalui ASEAN • Membentuk aliansi pertahanan alternatif atau membangun kerjasama militer di luar kawasan • Tekanan diplomatik yang berasal dari AUKUS. • Melenyapkan komitmen strategis dan bilateral. • Indonesia dikudilangi oleh kekuatan nuklir 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya peluang negosiasi proliferasi nuklir bersama AUKUS • Munculnya keanggotaan baru AUKUS • Diplomasi dan kerjasama militer 	Kooperatif
	Negatif		

Selanjutnya, jika ditinjau dari hubungan antara Indonesia dengan AUKUS (tabel 2), preferensi kebijakan Indonesia bekerjasama relatif kecil dibandingkan dengan China. Hal ini disebabkan karena kerjasama antara Indonesia dengan AUKUS berpeluang memperparah ketegangan geopolitik di kawasan. Alih-alih mengimbangi kekuatan, namun ini menjadi ancaman tersendiri buat Indonesia secara jangka panjang. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia lebih tertarik untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis di tengah kekhawatiran sanksi kebijakan CAATSA Amerika Serikat. Pilihan ini terlihat wajar, mengingat bahwa politik luar negeri bebas-aktif mencirikan sebuah ‘jalan tengah’ untuk memelihara hubungan dengan negara anggota AUKUS agar tetap berjalan harmonis ditengah persoalan diplomatik yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, Indonesia cenderung non-kooperatif dengan AUKUS dengan memperkuat kapabilitas militer dengan Perancis. Namun, yang perlu dicermati adalah, langkah Indonesia tersebut juga berarti bahwa perlombaan senjata di kawasan meningkat.

Tabel 3. China- Amerika Serikat

	Kepentingan Amerika Serikat		
Non- <u>kooperatif</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Hegemoni kawasan dan perluasan pengaruh • Memperkuat kemitraan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan agresivitas Tiongkok dan mengerahkan kekuatan di LCS 	<u>Kooperatif</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai LCS • Perluasan BRI • Hegemoni kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatif kecil 	
	Kepentingan Tiongkok		

Pada tabel ketiga, penulis berargumen bahwa ditengah persaingan antara AS bersama aliansi versus China, peluang terjadinya kerjasama relatif sangat kecil karena keduanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain, sebaliknya peluang keduanya untuk berkonflik ini lebih besar daripada keduanya kooperatif. Alasannya sederhana, karena setiap kebijakan luar negeri yang ditempuh keduanya cenderung didasari oleh ketidakpercayaan satu sama lain (*distrust*). Hubungan Tiongkok dan Aukus mencerminkan apa yang dinyatakan oleh Snyder sebagai perjuangan terus-menerus untuk memperoleh keamanan nasional (*national survival*) bagi masing-masing pihak.

Kesimpulan

Secara geopolitik Indonesia berada di kawasan persilangan maritim yang strategis di kawasan Asia/Indo-Pasifik. Persaingan kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia/Indo-Pasifik menempatkan negara ini ke dalam pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang problematis. Landasan politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini dijalankan oleh Indonesia sedang dipertaruhkan dalam konteks persaingan antara China *versus* AUKUS. Keterlibatan Amerika Serikat ke dalam aliansi pertahanan AUKUS dan agresifitas Tiongkok mempengaruhi sangat besar kepentingan keamanan nasional Indonesia, termasuk stabilitas keamanan serta usaha perdamaian di kawasan Asia/Indo Pasifik. Persaingan China *versus* AUKUS di kawasan Indo-Pasifik menjadi masalah bersama bagi seluruh negara di kawasan. Secara geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi medan persaingan pengaruh kekuatan karena jalur maritim yang berada dalam wilayah kedaulatan negara ini menjadi incaran bagi dua kekuatan besar di kawasan Asia/Indo-Pasifik. Pendekatan dilemma tahanan membantu menguraikan persoalan dan potensi ancaman serta memberikan pilihan bagi preferensi kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia.

Stabilitas keamanan dan perdamaian memiliki batas resiliensi tertentu. Ketika batas tersebut mencapai puncak, maka potensi terjadi perang terbuka tidak dapat dihindari. Kehadiran AUKUS dan pengaruh agresifitas Tiongkok menempatkan Indonesia ke dalam perangkap ganda dilemma tahanan. Pilihan Indonesia untuk menjalin kerjasama pertahanan ke negara ekstra-regional justru mempertajam proyeksi kekuatan militer di kawasan. Pertanyaan selanjutnya yang dapat dipertimbangkan untuk dikaji adalah bagaimana strategi politik luar negeri yang diperlukan Indonesia untuk mampu keluar dari rivalitas strategis AUKUS *versus* Tiongkok sekaligus meredam perlombaan senjata di kawasan Asia/Indo Pasifik tanpa mendistorsi hubungan-hubungan diplomatik yang telah terjalin sebelumnya dengan negara-negara yang sedang bersaing? Pertanyaan ini juga sekaligus mengajak para perumus kebijakan maupun akademisi untuk mendiskusikan kembali politik luar negeri bebas-aktif ditengah arus perubahan politik keamanan-internasional yang semakin dinamis.

Daftar Pustaka

Buku dan Bagian dalam Buku

K., 2005. *Trust and Mistrust in International Relations*. Princeton: Princeton University Press. doi: [10.1093/oso/9780190851163.003.0014](https://doi.org/10.1093/oso/9780190851163.003.0014)

Artikel Jurnal

Cheng, M., 2022. "AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications", *European Journal of Development Studies*, **2**(1): 1–7. doi: [10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63](https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63)

Delanova, M. O., 2021. "Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik", *Jurnal Dinamika Global*, **6**(02): 259–285. doi: [10.36859/jdg.v6i2.408](https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408)

Scott, D., 2019. "Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, **38**(2): 194–217. doi: [10.1177/1868103419860669](https://doi.org/10.1177/1868103419860669)

Snyder, G. H., 1971. "Prisoner's Dilemma and Chicken Models in International Politics", *International Studies Quarterly*, **15**(1): 66–103. doi: <https://doi.org/10.2307/3013593>

Laporan Penelitian

Brooke-Holland, L., et al., 2021. *The AUKUS Agreement* (No. 09335). United Kingdom: Commons Library. Retrieved from Commons Library website: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9335/>

Julienne, M, 2021. *AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pacific and It's Not Good News* (No. 93). Paris.

Martin, É., & Krapta, M., 2021. *The Dilemma of Middle Powers How AUKUS Has Reshaped the Potential for E3 Cooperation in the Indo-Pacific* (No. 166). Paris.

Swanstrom, N., & Panda, J., 2021. *AUKUS: Resetting European Thinking on Indo-Pacific* (N. Swanstrom & J. Panda, Eds.). Stockholm: Institute for Security and Development Policy. Retrieved from <https://isdp.eu/content/uploads/2021/10/AUKUS-Resetting-European-Thinking-on-the-Indo-Pacific-25.10.21.pdf>

Dokumen Resmi

Australian Department of Defence, 2020. 2020 Defence Strategic Update. Australian Government Department of Defence. Diakses dari <https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update>

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2021. Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/pernyataan-mengenai-kapal-selam-nuklir-australia

Publikasi Daring

Center for European Studies, 2022. "Power and Politics – The Prisoner's Dilemma", *Center for European Studies*, [Daring]. Diambil dari <https://europe.unc.edu/iron-curtain/power-and-politics-the-prisoners-dilemma/> (Diakses pada 25 April 2022).

Davies, A., et al., 2015. "Australia, Indonesia and the prisoner's dilemma", *Australian Strategic Policy Institute*. [Daring]. Diambil dari <https://www.aspi.org.au/publications/australia,-Indonesia-and-the-prisoners-dilemma> (Diakses pada 25 April 2022).

Choong, W., & Storey, I., 2021. "Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability", *ISEAS Perspective*, [Daring]. Diambil dari <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/> (Diakses pada 14 Februari 2022)

Nugroho, J., 2021. "AUKUS + Indonesia", *The Interpreter*, 29 September 2021. [Daring]. Diambil dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aukus-Indonesia> (Diakses pada 1 April 2022).

Jaknanihan, A., (2021, October 19). "Why Indonesia Should Embrace AUKUS", *East Asia Forum*, 19 Oktober 2021. [Daring]. Diambil dari <https://www.eastasiaforum.org/2021/10/19/why-Indonesia-should-embrace-aukus/> (Diakses pada 30 Maret 2022).

Mohan, M., 2021. "Singapore Welcomes Australia's Assurance that AUKUS Will Promote 'Stable and Secure' Asia Pacific: PM Lee", *Channel News Asia*, [Daring]. Diambil dari

[<https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-welcomes-australias-assurance-aukus-will-promote-stable-and-secure-asia-pacific-pm-lee-2271826>] (Diakses pada 2 April 2022).

Priyandita, G., & Herscovitch, B., 2021. "Indonesia-Australia: Deeper Divide Lies Beneath AUKUS Submarine Rift", *The Interpreter*, [Daring]. Diambil dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/Indonesia-australia-deeper-divide-lies-beneath-aukus-submarine-rift> (Diakses pada 16 Februari 2022).

Tempo, 2021. "China, Indonesia Voice Serious Concerns Over AUKUS Nuclear Submarine Deal", *Tempo* [Daring]. Diambil dari <https://en.tempoco.com/read/1522892/china-Indonesia-voice-serious-concerns-over-aukus-nuclear-submarine-deal> (Diakses pada 24 Maret 2022).

Tiezzi, S., 2014. "US-China Relations: Thucydidean Trap or Prisoner's Dilemma?", *The Diplomat*, [Daring]. Diambil dari <https://thediplomat.com/2014/03/us-china-relations-thucydidean-trap-or-prisoners-dilemma/> (Diakses pada 23 Maret 2022).